

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR (LKPJ)
TAHUN 2017**



Kata Pengantar

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyampaikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan sebagai hasil kinerja kepada masyarakat melalui DPRD sebagai lembaga legislatif daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur ini merupakan laporan penyampaian hasil kinerja/capaian indikator makro pembangunan di bidang kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2017. Semoga apa yang ada dalam buku laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan termasuk kendala program dan kegiatan yang dihadapi.

Atas bantuan dan masukan semua pihak terhadap buku laporan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pangkalpinang, Maret 2018

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



Dr. Ir. Budiman Ginting, Dipl, BE

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Lampiran.....	iii
I Pendahuluan	1
II Dasar Pelaksanaan	2
III Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan APBD, APBN Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 2017	3
IV LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017	6
IV. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan	6
4.1 Program Pengembangan Perikanan Budidaya	6
4.2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	9
4.3 Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan.....	12
4.4 Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan	13
V Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) 2017	16
V.1. Dekonsentrasi	16
V.2 Tugas Pembantuan	21
VI Penutup	22

Daftar Lampiran

1. Laporan Realisasi Anggaran APBD Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2017

I. PENDAHULUAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kelautan dan perikanan yang mempunyai tugas pokok menurut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2003 yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang kelautan dan perikanan;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan lintas Kabupaten/ Kota;
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Provinsi Kepulauan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan tugas-tugas khusus yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat di bidang Kelautan dan Perikanan.

Kepala Daerah/ sebagaimana diatur dalam UU Pemerintah Daerah adalah memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan laporan yang berisikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan (lima tahun) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pilihan kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan LKPJ adalah untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode tertentu selain itu penyusunan LKPJ juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi , efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pengawasan DPRD.

Hasil pembahasan DPRD atas LKPJ Kepala Daerah ditetapkan dalam keputusan DPRD berupa catatan-catatan yang sifatnya strategis untuk dipedomani oleh kepala daerah dalam pelaksanaan tugasnya.

Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan :

1. Urusan desentralisasi
2. Tugas Pembantuan
3. Tugas umum pemerintahan

II. DASAR PELAKSANAAN

- . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)

III. Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan APBD, APBN Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 2017

➤ Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2017

Dalam LKPJ akhir tahun anggaran 2017, tercatat Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep Babel memperoleh anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada APBD induk sebesar Rp.**31.312.979.687**. Pada APBD perubahan, anggaran Dinas Kelautan mengalami efisiensi sehingga menjadi Rp.**28.925.435.251,-** Adapun realisasi serapan anggaran hingga akhir tahun adalah sebesar **Rp.22.520.492.392** atau **77.86%**

Untuk penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan selama tahun 2017, DKP Provinsi memperoleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 101,597,418,563 dengan menjalankan 8 Program dan 43 kegiatan.

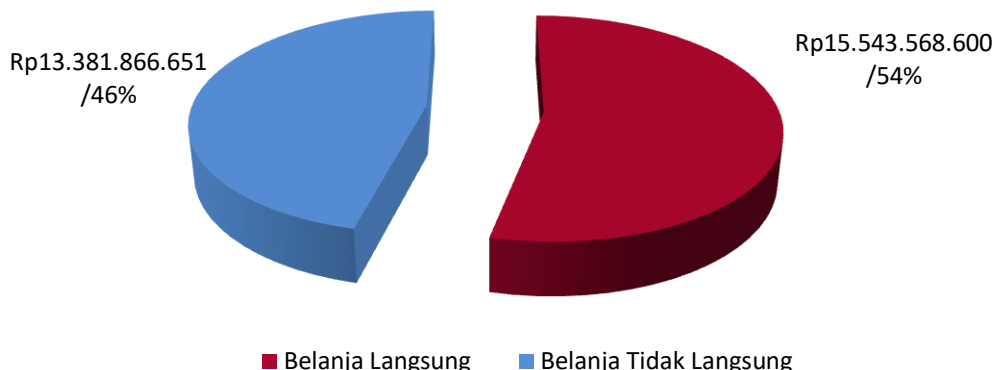
Anggaran belanja tidak langsung Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 13.381.866.651,- dengan realisasi sebesar Rp.9.881.969.830 atau 94.48%.

Sedangkan untuk belanja langsung DKP Tahun 2017 sebesar Rp15.543.568.600,- dengan realisasi sebesar Rp.9.881.969.830 atau 63.58%.

Adapun rincian komposisi anggaran Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung DKP dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran	
	Rp	Rp	%	Rp	%
2	3	4	5	6	7
Belanja Dinas 2017	31,312,979,687	28,925,435,251	86.30%	22,520,492,392	77.86%
Belanja Tidak Langsung	14,534,150,687	13,381,866,651	100.00	12,638,522,562	94.45%
a. Gaji dan Tunjangan	7,467,782,687	6,945,042,651	100.00	6,659,348,062	95.89%
b. Tambahan Penghasilan PNS	7,066,368,000	6,436,824,000	100.00	5,979,174,500	92.89%
Belanja Langsung	16,778,829,000	15,543,568,600	74.51%	9,881,969,830	63.58%

Komposisi Belanja pada APBD Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017



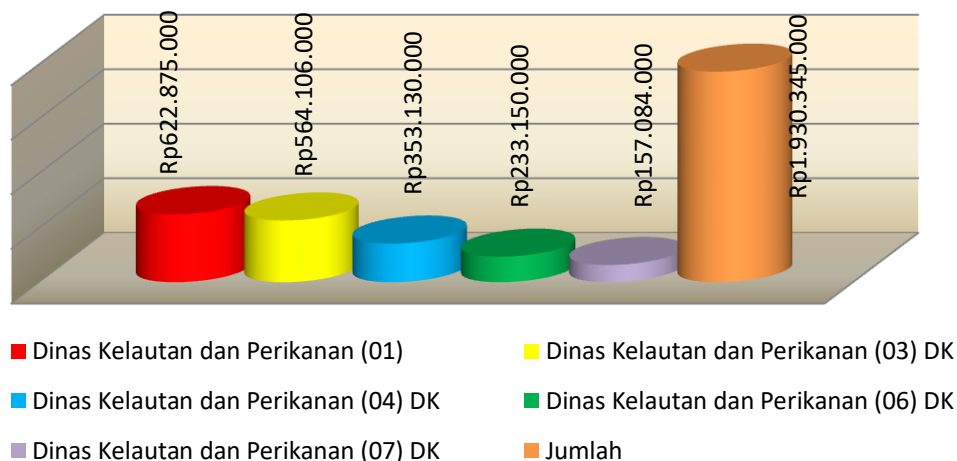
➤ Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi 2017

Untuk pelaksanaan dana Dekonsentrasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017, DKP Provinsi memperoleh anggaran sebesar Rp1.930.345.000,-. Realisasi serapan dana Dekonsentrasi sebesar Rp1.655.812.297 atau 85.78%

Komposisi anggaran dekonsentrasi terbesar adalah dari Sekretariat Jenderal KKP atau Satuan Kerja (DKP 01) dengan total anggaran sebesar Rp607.225.177,-.

Berikut grafik komposisi anggaran Dekonsentrasi kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017.

Komposisi Anggaran Dekonsentrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017



➤ **Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan 2017**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi memperoleh dana tugas pembantuan pada tahun 2017 sebesar Rp 450.000.000,- yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan Dirjen Perikanan Budidaya KKP. Adapun realisasi anggaran TP tahun 2017 adalah sebesar Rp.437.493.600 atau 97.22%.

Dana Tugas Pembantuan dari Ditjen Perikanan Budidaya berupa pengadaan peralatan dan mesin, pengadaan pakan ikan dan udang dan pengadaan induk ikan

	
Pengadaan Pakan Ikan yang berasal dari Dana TP Dirjen Budidaya	Pengadaan Induk Udang yang berasal dari Dana TP Dirjen Budidaya

DKP

2017

IV. LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

4. I Program Pengembangan Perikanan Budidaya

4.1.1. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa (DAK). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp654.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp14.040.000,- atau 2,15%. Keluaran dari kegiatan ini diharapkan berupa jasa konsultasi pengawas, pengadaan konstruksi jaringan air dan alat-alat perikanan budidaya seperti paket instalasi aerasi, resirkulasi air, peralatan panen, pemeliharaan larva dan paket perkolaman untuk BBIL Tanjung Rusa. Namun dalam pelaksanaannya yang dapat direalisasikan adalah honor panitia pelaksana kegiatan.

4.1.2. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali (DAK). Alokasi anggaran pada APBD Induk Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp400.000.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp107.015.000 atau 26,75%, dengan keluaran kegiatan tersedianya sarana dan prasarana pokok UPTD BBIS Pemali berupa jasa konsultasi pengawas, pengadaan alat pompa air dan mesin rumput, konstruksi jaringan air bersih, instalasi air limbah, pengadaan konstruksi kolam (rehab kolam), peralatan panen dan pembangunan rumah pompa. Namun yang dapat direalisasikan yaitu instalasi konstruksi jaringan air, instalasi pengolahan air limbah, pengadaan alat pompa, mesin rumput dan pembangunan rumah pompa.

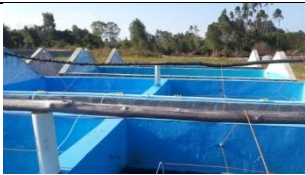


Gambar 1.3
Instalasi konstruksi jaringan air di BBIS



Gambar 1.4
Rumah Pompa di BBIS Pemali

4.1.3. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasana UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak (DAK) dengan pagu anggaran sebesar Rp1.500.253.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp588.384.000,- atau 39,22%, adapun keluaran kegiatan ini diharapkan berupa jasa konsultasi pengawas, pengadaan alat-alat laboratorium, jaringan konstruksi air, bersih, pengadaan konstruksi kolam, instalasi pengolahan air limbah, bangunan bangsal pakan alami, bangunan hatchery dan rehab indoor larva serta pengadaan alat-alat perikanan budidaya (peralatan pemijahan buatan, peralatan panen dan peralatan penetasan). Dalam pelaksanaannya yang dapat direalisasikan berupa peralatan alat-alat laboratorium, jaringan instalasi air, instalasi pengolahan air limbah dan peralatan perikanan budidaya (peralatan pemijahan buatan, peralatan panen dan peralatan penetasan).

	
Gambar 1.5 (Peralatan perikanan budidaya)	Gambar 1.6 Bak Fiber Bulat ukuran 500 L

4.1.4. Kegiatan Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp268.370.000,-. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp254.466.000,- atau 94,82%, dengan keluaran berupa pakan induk, pengadaan alat pakan ikan untuk menunjang kegiatan produksi di BBIS Pemali.

	
Gambar 1.7 Pakan Induk BBIS	Gambar 1.8 Mesin Pembuat Pakan Pelet

4.1.5. Kegiatan Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak. Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp320.840.000,-. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp315.188.560,- atau 98,24%, dengan keluaran berupa pembelian induk, pakan larva, pakan induk, pengadaan konstruksi tambak , peralatan kerja pembenihan dan budidaya ikan/udang.

	
Gambar 1.9 Induk Udang untuk BBIAP	Gambar 1.10 Pakan Induk Udang

4.1.6. Kegiatan Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa. oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp393.100.000,-. Adapun realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp381.184.000,- atau 96,97%, dengan keluaran berupa pakan pendederan, pakan larva, pakan induk, pengadaan alat pakan ikan untuk menunjang produksi di BBIL Tanjung Rusa.

	
Gambar 1.9 Alat Pembuat Mesin Pakan Ikan Laut	Gambar 1.10 Pakan Induk & Pakan Larva BBIL

• **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Program Perikanan Budidaya

1. Penyerapan kegiatan DAK UPTD Tiga Balai Benih yang tidak terserap maksimal, hal tersebut dikarenakan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merupakan pejabat

Dinas, bukan pejabat di Balai masing-masing, sehingga terkendala dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan, baik itu penyiapan dokumen lelang maupun teknis pelaksanaan lainnya.

2. Selain itu pelaksanaan kegiatan juga terkendala adanya peraturan dari Kementerian Keuangan bahwa pelaksanaan kegiatan DAK 2017 harus sudah memiliki Kontrak paling lambat 31 Agustus 2017 dan setelah tanggal tersebut menjadi tanggungjawab APBD untuk membayarnya.

Solusi

1. Meningkatkan konsolidasi internal terhadap hasil pencapaian target Program Pembangunan sebagaimana yang telah dicapai di Tahun 2017;
2. Menempatkan orang yang tepat pada kegiatan yang tepat, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik

4.2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

4.2.1. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dengan pagu anggaran dalam APBD Induk sebesar Rp3.000.000.000,-. Pada APBD Perubahan kegiatan ini mengalami efisiensi sehingga menjadi Rp745.155.600. Realisasi anggaran sebesar Rp409.545.200 atau 54,96%, dengan keluaran kegiatan berupa pendataan kartu nelayan dan pendataan asuransi nelayan.



4.2.2. Kegiatan Pengelolaan Data statistik Perikanan Tangkap. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp47.250.000,-. Namun pada APBD Perubahan kegiatan ini tidak lagi diakomodir.

4.2.3. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Kegiatan ini dianggarkan pada APBD Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai konsekuensi diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014, dimana kewenangan PPI yang ada di Kabupaten/Kota beralih ke Provinsi. Adapun anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp329.908.000 dengan realisasi Rp.57.993.664,- atau 17,58%. Keluaran dari kegiatan ini diharapkan berupa terselenggaranya fungsi pelayanan serta kinerja Pangkalan Pendaratan Ikan yang beralih kewenangannya ke Provinsi yaitu PPI Muara Sungai Batu Rusa, PPI Kurau, PPI Sungai Selan, PPI Sadai, PPI Manggar dan PPI Selat Nasik. Namun dalam pelaksanaannya yang dapat direalisasikan adalah berupa operasional kelistrikan saja, sedangkan untuk pembayaran gaji tenaga honorer belum dapat direalisasikan karena SK dari BKPSDM selaku koordinator tenaga kontrak belum keluar sampai dengan waktu pelaksanaan kegiatan.



Gambar 1.13
Operasional PPI Gantung, Belitung
Timur yang sudah dialihkan
kewenangannya ke Provinsi



Gambar 1.14
Aktivitas Bongkar Muat di PPI Sungai
Selan

4.2.4. Kegiatan Pilot Project Penggunaan Mesin Tempel Alternatif Non BBM

dan Gas Ukuran Mesin 5 PK untuk Kapal Nelayan. Kegiatan ini muncul pada APBD Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp.214.520.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.9.132.000,- atau sebesar 4,26%. Keluaran dari kegiatan ini diharapkan berupa percontohan penggunaan mesin tempel alternative. Namun dalam pelaksanaannya yang dapat direalisasikan adalah perjalanan dinas luar daerah dan honor panitia pelaksanaan.

- 4.2.5. Kegiatan Kajian Prototype Jenis Kapal Fiber Representatif untuk nelayan 3 GT. Kegiatan ini diakomodir pada APBD Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp.306.960.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.298.444.200,- atau sebesar 97,23%, dengan keluaran kegiatan berupa satu buah *prototype* Kapal 3 GT.

	
Gambar 1.15 Prototype Kapal Fiber untuk Nelayan 3 GT	Gambar 1.16 Uji Coba Prototype Kapal Fiber untuk Nelayan 3 GT

- 4.2.6. Kegiatan Pilot Project Penggunaan Energi Bayu untuk Kapal Nelayan. Kegiatan ini diakomodir pada APBD Perubahan dengan anggaran sebesar Rp221.520.000,-. Keluaran kegiatan ini seharusnya adalah berupa percontohan kapal nelayan dengan energi Bayu, namun kegiatan ini tidak dilaksanakan.

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Program Perikanan Tangkap

1. Terdapat dua kegiatan prioritas pada APBD Perubahan yang tidak dilaksanakan, yaitu Pilot Project penggunaan mesin tempel alternatif non bbm dan gas ukuran mesin 5 PK untuk kapal nelayan dan Pilot Project Penggunaan Energi Bayu untuk Kapal Nelayan. Dua kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan hasil survey di lapangan tidak ada satu pun distributor, supplier, toko atau agen yang menyediakan atau ada persediaannya. Untuk pengadaan barang tersebut harus memesan terlebih dahulu.
2. Disamping itu PPTK sudah mencari supplier barang tersebut dan supplier yang ada tidak mencantumkan secara jelas dan rinci spesifikasi barang sehingga PPTK kegiatan tidak dapat

menentukan HPS.

Solusi

1. Untuk pengadaan pilot project yang tidak umum (barang – barang) yang sulit dicari di pasaran akan dianggarkan kembali pada APBD Induk agar cukup waktu untuk melaksanakannya.

4.3. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan

- 4.3.1.** Kegiatan Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pagu anggaran pada APBD Induk sebesar Rp269.305.000,- pada APBD Perubahan mengalami penghematan sehingga anggaran menjadi Rp181.660.000,-. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp49.935.500,- atau sebesar 27,49%. Keluaran dari kegiatan ini diharapkan berupa partisipasi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mempromosikan potensi perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam tiga kali pameran. Namun dalam pelaksanaannya yang dapat direalisasikan hanya satu kali pameran yaitu pada pameran Festival Perikanan Nusantara yang dilaksanakan pada tanggal 20 – 22 November 2017 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.



Gambar 1.17
Stand DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pameran Festival Perikanan Nusantara 20 – 22 November 2017



Gambar 1.18
Promosi Produk Kelautan dan Perikanan pada Festival Perikanan Nusantara di TMII Jakarta

- 4.3.2.** Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Promosi Serta Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pagu

anggaran pada APBD Induk sebesar Rp538.974.500,-. Pada APBD Perubahan kegiatan ini mengalami penghematan sehingga anggaran menjadi Rp465.119.500,- Adapun realisasi sebesar Rp402.128.300,- atau 86,46%. Keluaran kegiatan ini berupa terlaksananya kegiatan Safari Gemarikan, Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi pada tanggal 7 November 2017, di D' Garden Sungailiat, serta partisipasi pemenang Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi ke Lomba Masak Ikan Nasional di Jakarta pada tanggal 20 November 2017.

	
Gambar 1.19 Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi dan Kampanye Gemarikan Tingkat Provinsi 2017	Gambar 1.20 Peninjauan Ketua Tim Penggerak PKK, Hj. Melati Erzaldi

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan

Tidak terdapat permasalahan dan kendala yang berarti dalam pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan

4.4. Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan

4.4.1. Kegiatan Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pagu anggaran sebesar Rp2.902.450.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp1.651.797.710,- atau 56,91%. Keluaran kegiatan ini diharapkan berupa Draft Dokumen RZWP3K yang sudah melewati tahap konsultasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan melewati tahapan konsultasi publik lengkap dengan alokasi ruangnya. Namun dalam pelaksanaannya yang dapat direalisasikan adalah Draft Dokumen RZWP3K yang

belum terkonsultasikan lengkap dengan alokasi ruangnya.

	
Gambar 1.20 Konsultasi Publik Laporan Antara Penyusunan RZWP3K	Gambar 1.21 Suasana Pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan RZWP3K

4.4.2. Kegiatan Peningkatan Fungsi BOOST Center dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pagu anggaran sebesar Rp146.880.000,-. Adapun realisasi untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp113.344.350,- atau 77,17%. Keluaran kegiatan berupa tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Babel Ocean Observation Science & Technology Center.

	
Gambar 1.21 Kegiatan pemeliharaan Stasiun BOOST Tanjung Tinggi	Gambar 1.22 Kegiatan Pemeliharaan Stasiun BOOST Sadai

4.4.3. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pagu anggaran sebesar Rp844.120.500,-.

Realisasi kegiatan ini sebesar Rp403.491.849 atau 47,80%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan dan perlengkapan operasional kapal pengawas.



	
Gambar 1.23 Kegiatan Pengawasan Indikasi Illegal BMKT di atas Kapal	Gambar 1.24 Kegiatan Patroli Kapal Pengawas di Perairan Bangka Tengah

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan Pelaksanaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan

1. Pembayaran Kegiatan Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termin ke III yang tidak dapat dibayar penuh kepada pihak ketiga, hal ini disebabkan pekerjaan melewati tanggal berakhirnya kontrak yaitu tanggal 18 Desember 2017. Sedangkan pada syarat khusus kontrak, pembayaran termin ketiga berupa laporan akhir yang sudah dikonsultasi tekniskan di KKP pada tanggal 21 Desember 2017. Disamping itu pada draft laporan akhir belum ada kesepakatan terhadap alokasi ruang karena konsultasi public baru dilaksanakan tanggal 29 Desember 2017.

Solusi

1. Berkoordinasi dengan BPKP untuk pembayaran Termin ketiga kegiatan Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan diajukan kembali pembayarannya melalui APBD Perubahan 2018.

DKP

2017

BAB V

PENYELENGGARAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN (TP)

V. I Dekonsentrasi

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
Dinas / Satker : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program/ Kegiatan	Pagu Dana Program	Pagu Dana Kegiatan	Realisasi		Capaian	Ket
		Rp	Rp	Rp	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	622.875.000,-	622.875.000,-	607.225.177,-	97,49		DK
	a. Pengelolaan Keuangan KKP	73.909.000,-	73.909.000,-	66.309.700.000,-	89.72	- 1 (Satu) Dokumen Laporan Wilayah Uang dan Barang	
	b. Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran Kinerja dan Pelaporan KKP	504.266.000,-	504.266.000,-	498.272.377,-	98.81	- 6 (Enam) Dokumen pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan movev pembangunan KP di provinsi - 12 (Dua Belas) Bulan Layanan Perkantoran	
	c. Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	44.700.000,-	44.700.000,-	42.643.100,-	95.40	- 1 (satu) Layanan Data dan Informasi	
II	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	564.106.000,-	564.106.000,-	372.665.420	66.06		DK
	a. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan sertifikasi Awak Kapal Perikanan	67.950.000,-	67.950.000,-	55.565.000,-	81.77	- 30 orang awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan;	
	b. Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	144.053.000,-	144.053.000,-	108.318.000	75.19	- 1 Lokasi pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran; - 1 Lokasi unit Pelabuhan Perikanan yang terpantau dan dievaluasi;	

No	Program/ Kegiatan	Pagu Dana Program	Pagu Dana Kegiatan	Realisasi		Capaian	Ket
		Rp	Rp	Rp	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	c. Pengendalian Penangkapan Ikan	172.936.000,-	172.936.000,-	118.502.100	68.52	- 1 Prov penguatan sistem perizinan daerah	
	d. Pengelolaan Kenelayanan	263.698.000,-	263.698.000,-	136.408.500	51.73	- Jumlah nelayan yang terlindungi (Orang) - Jumlah akses pendanaan usaha nelayan (Lokasi) - Jumlah Fasilitas sertifikasi nelayan (bidang tanah) - Jumlah kelembagaan usaha nelayan yang meningkat kapasitasnya (kelompok) - Jumlah Pembinaan sistem informasi kenelayanan (lokasi)	
	e. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	23.154.000,-	23.154.000,-	8.049.456	34.76	- Jumlah ketersediaan data dan statistic perikanan tangkap - Jumlah perairan yang terevaluasi pengelolaan sumber daya ikannya (WPP) - Jumlah laut territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya; - 1 Unit Kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan;	

DKP

2017

No	Program/ Kegiatan	Pagu Dana Program	Pagu Dana Kegiatan	Realisasi		Capaian	Ket
		Rp (3)	Rp (4)	Rp (5)	% (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	65.251.000	65.251.000	64.324.464,-	98.58	- 1 Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat; - 1 Dokumen Pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan DJPT	
III	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	353.130.000,-	353.130.000,-	335.039.400	94.88		DK
	a. Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	600.000,-	600.000,-	600.000,-	100	- Kawasan budidaya yang penyakit ikan penting dilakukan survailan atau monitoring	
	b. Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan	30.140.000,-	30.140.000,-	28.744.000,-	95.37	- Produksi Benih dihasilkan di UPT dan UPTD (Juta Ekor)	
	c. Pengelolaan Sistem Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	32.940.000,-	32.940.000,-	31.403.700,-	95.34	- 1 kawasan yang prasarannya mampu dioperasikan secara tepat Guna 91 Kawasan); - Kawasan Budidaya yang disurveilasi dan atau dimonitoring penyakit ikannya (Kab/Kota)	

DKP

2017

No	Program/ Kegiatan	Pagu Dana Program	Pagu Dana Kegiatan	Realisasi		Capaian	Ket
		Rp	Rp	Rp	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	d. Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	127.550.000,-	127.550.000,-	118.072.400	92.57	- 8 Kelompok budidaya yang siap untuk disertifikasi CBIB; - 93 unit pembudidayaan ikan bersertifikasi CBIB; - 11 jenis pakan ikan yang terjamin mutunya; - 2 laporan analisis dan publikasi data statistik perikanan budidaya	
	e. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	135.920.000,-	135.920.000,-	130.716.400,-	96.17	- 1 Dokumen Perencanaan, Kerjasama, Evaluasi, dan Pelaporan Program dan Anggaran berdasarkan Data Terkini dan Akurat ; - 1 Dokumen Pengembangan Administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya; - 12 Bulan Layanan Perkantoran	
	f. Pengelolaan Pakan Ikan	25.980.000,-	25.980.000,-	25.502.900,-	98.16	- Lokasi produsen pakan mandiri yang mendukung kawasan/sentra produksi perikanan budidaya (provinsi) - Unit Produsen pakan ikan bersertifikat CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang baik)	
V	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	233.150.000,-	233.150.000,-	195.752.400,-	83.96		DK

No	Program/ Kegiatan	Pagu Dana Program	Pagu Dana Kegiatan	Realisasi		Capaian	Ket
		Rp (3)	Rp (4)	Rp (5)	% (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	a. Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	90.700.000	90.700.000	75.000.000,-	82.69	- Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan (1 Provinsi)	
	b. Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	75.050.000,-	75.050.000,-	54.238.000	72.27	- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan(20 SKP)	
	c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	67.400.000,-	67.400.000,-	66.514.400,-	98.69	- 1 Dokumen Perencanaan dan pelaporan;	
VI	Program Pengelolaan Ruang Laut	157.084.000,-	157.084.000,-	145.129.900,-	92.39		DK
	a. Perencanaan Ruang Laut	49.584.000,-	49.584.000,-	45.646.200	92.06	- Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui praturan perundangan (1 Dokumen)	
	b. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K	107.500.000,-	107.500.000,-	99.483.700,-	92.54	- 1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan)	
TOTAL		1.930.345.000,-	1.930.345.000,-	1.655.812.297	85.78		

➤ **Permasalahan**

1. Tidak terdapat permasalahan berarti dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

DKP

2017

V. II Tugas Pembantuan

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
Dinas / Satker : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana Program	Pagu Dana Kegiatan	Realisasi		Capaian	Ket
		Rp (3)	Rp (4)	Rp (6)	% (7)		
I	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	450.000.000,-	450.000.000,-	437.493.600,-	97.22		TP
	a. Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan	324.000.000,-	324.000.000,-	316.525.000,-	97.69	- Produksi Benih yang dihasilkan di UPT dan UPTD (4 Juta Ekor)	
	b. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Dirjen Perikanan Budidaya	126.000.000,-	126.000.000,-	120.968.600	96.01	- Layanan Perkantoran	
TOTAL		450.000.000,-	450.000.000,-	437.493.600,-	97.22		

➤ Permasalahan

Tidak terdapat permasalahan berarti dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



V. Penutup

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung urusan kelautan dan perikanan memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Selain itu LKPJ ini menjadi media komunikasi pertanggungjawaban kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus meningkatkan program pembangunan kelautan dan perikanan yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari pembahasan LKPJ yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD akan menyusun rekomendasi yang konstruktif (membangun) untuk peningkatan dan pengembangan bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menerima masukan dan rekomendasi dari DPRD untuk terwujudnya kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang lebih baik lagi di masa mendatang.



Lampiran

LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Belanja Dinas		31.312.979.687	28.925.435.251	86,30%	22.520.492.392	77,86%	6.404.942.859	22,14%
I Belanja Tidak Langsung		14.534.150.687	13.381.866.651	100,00	12.638.522.562	94,45%	743.344.089	5,55%
a. Gaji dan Tunjangan		7.467.782.687	6.945.042.651	100,00	6.659.348.062	95,89%	285.694.589	4,11%
b. Tambahan Penghasilan PNS		7.066.368.000	6.436.824.000	100,00	5.979.174.500	92,89%	457.649.500	7,11%
II Belanja Langsung		16.778.829.000	15.543.568.600	74,51%	9.881.969.830	63,58%	5.661.598.770	36,42%
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4.101.461.000	4.151.461.000	100,00	3.735.012.017	89,97%	416.448.983	10,03%
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		15.390.000	15.390.000	100,00	10.132.250	65,84%	5.257.750	34,16%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		244.800.000	214.800.000	100,00	158.608.113	73,84%	56.191.887	26,16%
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		262.800.000	191.640.000	100,00	163.680.000	85,41%	27.960.000	14,59%
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		32.056.000	32.056.000	100,00	23.090.850	72,03%	8.965.150	27,97%
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		90.000.000	80.000.000	100,00	41.502.000	51,88%	38.498.000	48,12%
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor		123.000.000	163.000.000	100,00	163.000.000	100,00%	0	0,00%
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		65.000.000	65.000.000	100,00	64.958.900	99,94%	41.100	0,06%
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15.000.000	15.000.000	100,00	12.428.980	82,86%	2.571.020	17,14%
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7.920.000	7.920.000	100,00	7.043.000	88,93%	877.000	11,07%
10. Penyediaan bahan logistik kantor		10.250.000	10.250.000	100,00	6.756.000	65,91%	3.494.000	34,09%
11. Penyediaan makan dan minuman		53.000.000	53.000.000	100,00	11.400.000	21,51%	41.600.000	78,49%
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		300.000.000	350.000.000	100,00	347.752.460	99,36%	2.247.540	0,64%
13. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		745.760.000	745.760.000	100,00	713.240.000	95,64%	32.520.000	4,36%
14. Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali		560.660.000	560.660.000	100,00	504.997.718	90,07%	55.662.282	9,93%
15. Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak		443.800.000	443.800.000	100,00	421.916.251	95,07%	21.883.749	4,93%
16. Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa		549.570.000	549.570.000	100,00	530.923.249	96,61%	18.646.751	3,39%
17. Peningkatan Fungsi Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)		432.455.000	482.455.000	100,00	387.882.546	80,40%	94.572.454	19,60%
18. Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah		150.000.000	171.160.000	100,00	165.699.700	96,81%	5.460.300	3,19%
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		875.390.000	980.816.000	100,00	653.207.370	66,60%	327.608.630	33,40%
1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		116.440.000	221.866.000	100,00	199.800.000	90,05%	22.066.000	9,95%
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan rehab gedung kantor		100.000.000	100.000.000	100,00	96.367.000	96,37%	3.633.000	3,63%
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan rehab UPTDBBIAP Tanjung Krasak		83.600.000	83.600.000	100,00	78.100.000	93,42%	5.500.000	6,58%
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional		575.350.000	575.350.000	100,00	278.940.370	48,48%	296.409.630	51,52%
C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		158.470.000	158.470.000	100,00	105.187.400	66,38%	53.282.600	33,62%
1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Aparatur		140.000.000	140.000.000	100,00	94.369.550	67,41%	45.630.450	32,59%
2. Penilaian Angka Kredit		18.470.000	18.470.000	100,00	10.817.850	58,57%	7.652.150	41,43%
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		357.965.000	357.965.000	100,00	332.472.710	92,88%	25.492.290	7,12%
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		249.315.000	249.315.000	100,00	241.847.810	97,00%	7.467.190	3,00%
2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		108.650.000	108.650.000	100,00	90.624.900	83,41%	18.025.100	16,59%

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E. Program Pengembangan Perikanan Budidaya	3.536.563.000	3.536.563.000	48,31	1.660.277.560	46,95%	1.876.285.440	53,05%
	1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa (DAK)	654.000.000	654.000.000	2,39	14.040.000	2,15%	639.960.000	97,85%
	2. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali (DAK)	400.000.000	400.000.000	27,74	107.015.000	26,75%	292.985.000	73,25%
	3. Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak (DAK)	1.500.253.000	1.500.253.000	39,97	588.384.000	39,22%	911.869.000	60,78%
	4. Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali	268.370.000	268.370.000	100,00	254.466.000	94,82%	13.904.000	5,18%
	5. Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak	320.840.000	320.840.000	100,00	315.188.560	98,24%	5.651.440	1,76%
	6. Pengadaan Sarana Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa	393.100.000	393.100.000	100,00	381.184.000	96,97%	11.916.000	3,03%
	F. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	3.047.250.000	1.818.063.600	52,95	775.115.064	42,63%	1.042.948.536	57,37%
	1. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	3.000.000.000	745.155.600	60,00	409.545.200	54,96%	335.610.400	45,04%
	2. Pengolahan data statistik perikanan tangkap	47.250.000	0	0,00	0	0,00%	0	
	3. Peningkatan Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan	0	329.908.000	60,00	57.993.664	17,58%	271.914.336	82,42%
	4. Pilot Project Penggunaan Mesin Tempel Alternatif Non BBM dan Gas Ukuran Mesin 5 PK untuk Kapal Nelayan	0	214.520.000	5,00	9.132.000	4,26%	205.388.000	95,74%
	5. Kajian prototype Jenis Kapal Fiber Representatif untuk Nelayan 3 GT	0	306.960.000	100,00	298.444.200	97,23%	8.515.800	2,77%
	6. Pilot project penggunaan energi Bayu untuk Kapal Nelayan	0	221.520.000	0,00	0	0,00%	221.520.000	100,00%
	G. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	808.279.500	646.779.500	81,74	452.063.800	69,89%	194.715.700	30,11%
	1. Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan	269.305.000	181.660.000	35,00	49.935.500	27,49%	131.724.500	72,51%
	2. Pengembangan dan pembinaan promosi serta kerjasama pemasaran hasil perikanan	538.974.500	465.119.500	100,00	402.128.300	86,46%	62.991.200	13,54%
	H. Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan	3.893.450.500	3.893.450.500	70,18	2.168.633.909	55,70%	1.724.816.591	44,30%
	1. Penyelesaian Draft RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.902.450.000	2.902.450.000	70,60	1.651.797.710	56,91%	1.250.652.290	43,09%
	2. Peningkatan Fungsi BOOST Center	146.880.000	146.880.000	100,00	113.344.350	77,17%	33.535.650	22,83%
	3. Peningkatan Fungsi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	844.120.500	844.120.500	100,00	403.491.849	47,80%	440.628.651	52,20%